

Kebijakan Partai Politik Terhadap Caleg Perempuan pada Pemilu 2009 di Bangka Belitung

Aimie Sulaiman *

Abstract

Affirmative action is an advocacy effort to women in politic domain considering presence of gap between male and female representatives in parliaments. This legal intervention effort must be signified as contemporary action and access for women to participation in constellation of 2009 election. We expect that women' representations give policies, which consider women' interest. This study is titled "Political Party Policies in Preparing Female Legislative Candidates of 2009 Election in Bangka Belitung".

This study objective was to identify internal and external political party policies in preparing female cadres of 2009 election, inhibitive and supportive factors for female politicians, and strategies of party campaign of Golkar and PDI Perjuangan parties . Methods used in this study were qualitative methods with descriptive-analytic approaches. Study objects were Golkar and PDI Perjuangan parties for party management in provincial level. Sources of data consisted of elements of KPUD, party leaders or party managerial personnel, female legislative candidates and female legislative members of 2004 election result. Considering that sources of date were established for interest to achieve, samples were taken purposively. Data were collected by interview, participant and non participant observer, and documentation of 2004 election result. Technique of data analysis was started by reduction, presentation and interpretation of data.

Encouragement of female politic awareness is not sufficiently only solved constitutionally. There must be social, cultural and structural efforts in revising party-internal policy. These aspects contributed positively to construction of female existence in political domain. Problem would reverse when Article 214 of Law No. 10/2008 was canceled by Constitution Court relative to specification of legislative candidates. Most voices systems will complicate opportunity of female legislative candidates because most of them are not well-known by constituents; in addition, free fight competition causes unhealthy competition and illegal logic practices. Internal and external policies, when recruitment process of legislative candidates do not give significant effect so that opportunity of female legislative candidates to elect becomes less sufficient, make females more unable to compete against patriarchal domination. Appropriate campaign strategy can help achieve legislative candidate socialization process.

Political enlightenment which is expected from presence of quota policy, finally becomes quasi because political decision made by Constitution Court is irrational or ambiguous policy. Reasons are that, epistemologically, quota must be given to proportional election system with sequential number system than most voices system with free fight competition.

Keywords: *policy, fairness and commitment.*

*Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial sekaligus Kepala Program Studi Sosiologi.

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Pemilu April 2009 diwarnai dengan munculnya partai politik baru sebagai konsekuensi sistem multipartai dalam sistem politik masa reformasi. Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, ada 36 partai politik peserta Pemilu 2009. Fokus perhatian dalam penelitian ini adalah kebijakan internal dan eksternal partai politik dalam proses rekrutmen caleg, strategi kampanye partai politik dan strategi kampanye caleg perempuan. Seperti diketahui legalitas *affirmative action* yang dituangkan dalam UU Pemilu dan UU Partai politik menjadi akses bagi perempuan untuk masuk dalam ranah politik. Penyertaan 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif diperkuat dengan sistem "zipper" dimana dalam 3 calon legislatif harus terdapat 1 caleg perempuan. Sekilas, aturan ini merupakan keberpihakan yang menguntungkan perempuan, namun dalam praktiknya tidaklah demikian. Penempatan caleg perempuan dalam daftar caleg masih dibawah dominasi caleg laki-laki. Banyak persoalan yang melatarbelakangi lemahnya posisi dan nilai tawar perempuan dalam ranah politik, paling tidak pengaruh struktur politik dan budaya ditengarai sebagai penyebabnya.

Ada tiga alasan mengapa tindakan afirmatif diperlukan sebagai upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam parlemen. *Pertama*, diperlukan intervensi struktural sebagai tindakan darurat untuk memperbaiki ketimpangan gender dalam berbagai bidang dalam waktu yang cepat. *Kedua*, dalam bidang politik, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih sangat rendah sehingga diperlukan adanya quota. *Ketiga*, pengalaman hidup perempuan memiliki nilai yang khas yang dirasakan perempuan, dan nilai-nilai intrinsik ini disinyalir dapat melahirkan pendekatan yang berbeda sementara etika perempuan juga berbeda dengan etika laki-laki. Dikatakan bahwa perempuan mempunyai etika kepedulian yang tinggi sementara laki-laki lebih menonjolkan etika keadilan.

Partai politik merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembentukan kekuasaan negara. Melalui partai politik inilah berbagai kepentingan masyarakat akan diserap dan diadopsi dalam bentuk kebijakan negara. Fungsi-fungsi partai politik dalam negara adalah melaksanakan fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, dan kontrol politik. Partai politik juga diartikan sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam rangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan umum.

Representasi perempuan di parlemen secara substansi diharapkan mampu berdiri "atas nama" dan "bertindak untuk" perempuan secara simultan (*gender power*). Adanya ketimpangan antara *das seins* bahwa diperlukan keterwakilan perempuan yang signifikan dalam lembaga legislatif yang nantinya diharapkan mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pembangunan yang responsif gender dan *das sollen* bahwa keterwakilan itu sendiri masih jauh dari yang diharapkan.

Kondisi ini menjadi inspirasi penelitian yang diberi judul **Kebijakan Partai Politik dalam Mempersiapkan Calon legislatif Perempuan pada Pemilu 2009 di Bangka Belitung.**

2. Rumusan Masalah.

Dalam upaya menganalisis kontestasi perempuan berpolitik dalam upaya memenuhi quota 30 persen di lembaga legislatif pada Pemilu 2009, riset ini akan menyajikan fakta empiris tentang keberadaan perempuan dalam partai politik, kebijakan dan strategi partai dalam proses rekrutmen caleg, dan hambatan-hambatan yang dialami politisi perempuan dalam karier politiknya. Adapun rumusan masalah penelitian ini secara spesifik adalah: Bagaimana kebijakan internal dan eksternal partai politik dalam mempersiapkan kader perempuan untuk menghadapi Pemilu 2009?

3. Tujuan Penelitian.

1. Mengidentifikasi kebijakan internal dan eksternal partai politik dalam proses rekrutmen caleg perempuan pada Pemilu 2009.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung politisi perempuan dalam ranah politik.
3. Mengidentifikasi strategi-strategi partai politik untuk menghadapi Pemilu 2009.

4. Tinjauan Pustaka.

Membaca fenomena perempuan dalam politik memberikan gambaran bagi kita untuk lebih memahami ragam hambatan yang dihadapi. Sistem dan struktur yang tidak berpihak, nilai kultural dan faktor internal dari perempuan memberi warna yang memperkuat hambatan-hambatan tersebut. Realitas gambaran ini tertuang dalam hasil penelitian dari A.D. Kusumaningtyas tentang Perempuan dalam Partai-Partai Politik Islam Peserta Pemilu 2004. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam partai-partai politik Islam (PPP, PKB, PBB, PAN, dan PKS) mempunyai dua pandangan yang berbeda tentang perempuan dalam politik, yaitu partai Islam yang liminatif terhadap hak-hak perempuan dan partai yang liberatif terhadap hak-hak perempuan dalam politik.

Dalam konteks penelitian ini, dua partai politik yang menjadi objek penelitian yaitu partai Golkar dan PDI Perjuangan. Golkar dengan paradigma baru berupaya mencitrakan diri sebagai partai politik yang aspiratif terhadap perubahan-perubahan. Sejauh mana perubahan tersebut memberi ruang positif bagi kader perempuan dalam pencalonan legislatif pada Pemilu 2009. Sementara, PDI Perjuangan dengan eksistensi perempuan sebagai tampuk pimpinan partai, apakah akan memberikan pengaruh positif bagi kader perempuannya untuk berkontestasi. Atau justru keberagaman pandangan dalam memosisikan perempuan dalam partai politik akan sama halnya dengan penelitian sebelumnya.

Dari daftar calon legislatif, kedua partai yang menjadi objek penelitian ini masih menempatkan caleg perempuan pada nomor urut dibawah. Meskipun ada

pertimbangan prestasi dalam rekrutmen caleg tetapi belum terlihat bahwa caleg perempuan mampu mengungguli posisi caleg laki-laki. Kenyataan ini semakin diperburuk dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 tentang penetapan calon legislatif. Sebelumnya penetapan calon legislatif berdasarkan nomor urut berubah berdasarkan suara terbanyak. Kebijakan yang terkait penetapan ini sama-sama tidak memberi ruang gerak yang leluasa bagi caleg perempuan ketika mereka tidak memiliki nilai lebih yang bisa diunggulkan dalam kontestasinya pada Pemilu 2009.

5. Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan sebuah kajian sosiologis dengan metode kualitatif untuk menganalisis realitas sosial perempuan dalam partai politik. Metode kualitatif pada dasarnya digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam tentang pengalaman seseorang dalam hal ini perempuan dalam partai-partai politik, relasi antara peran lembaga politik dan politisi perempuan, faktor pendukung dan penghambat bagi politisi perempuan.

Pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisis realitas ini adalah deskriptif analitis. Tujuan utama dari penelitian deskriptif ialah melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa sehingga relevansi sosiologis diharapkan dapat tercapai.

5.1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terfokus pada kepengurusan partai tingkat propinsi. Alasan dari pemilihan lokasi ini, *pertama*, propinsi yang baru berusia sewindu ini merupakan wilayah yang memiliki potensi sosial budaya yang beragam. Keberagaman tersebut dapat dianggap sebagai modal sosial (*social capital*) ketika budaya patriarki ditengarai sebagai penghambat perempuan dalam ranah politik. *Kedua*, mengingat bahwa hasil Pemilu 2004 menunjukkan keterwakilan "bisu" perempuan di DPRD Propinsi. Dari 35 komposisi kursi parlemen hanya ada 1 (satu) kursi parlemen yang di wakili oleh perempuan.

5.2. Objek Penelitian.

Partai yang dipilih menjadi objek penelitian disini adalah partai Golkar dan PDI Perjuangan. Alasan dipilihnya kedua partai ini menjadi objek penelitian, *pertama*, bahwa sepanjang sejarah politik di tanah air baik pada masa Orde Baru maupun dalam transisi demokrasi pasca Orde Baru, ke dua partai ini tetap pada posisi teratas dalam perolehan suara di lembaga legislatif. Seperti diketahui, PDI Perjuangan di bawah ke pimpinan Megawati Soekarni Putri berhasil menjadi pemenang pada Pemilu Legislatif 1999. Kemampuan PDI Perjuangan untuk merebut suara akar rumput (*grass root*) merepresentasikan partai wong cilik yang menjadi ikon perjuangan dari partai politik ini. *Kedua*, sejauh mana keberpihakan Megawati sebagai perempuan yang memimpin partai politik besar berpengaruh kepada rekrutmen caleg perempuan.

Sementara partai Golkar dengan kebangkitannya dari turbulensi politik era

reformasi berhasil membuktikan eksistensinya sebagai partai yang masih mendapat dukungan dari rakyat. Ketika partai-partai politik baru lahir sebagai konsekuensi logis demokrasi di Indonesia, partai Golkar masih mampu bertahan sebagai partai besar di setiap *election event*. Untuk Bangka Belitung, partai Golkar masih tetap populer terutama bagi pemilih tradisional. Yang dimaksud dengan pemilih tradisional disini adalah pemilih lama yang menjadi pendukung partai ini sejak Orde Baru.

5.3. Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Posisi perempuan dalam struktur kepengurusan dan platform partai.
2. Program kegiatan partai yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan isu-isu tentang gender.
3. Kebijakan dan strategi partai politik untuk mempersiapkan *human capital* dalam proses penjangkaran caleg perempuan.
4. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi politisi perempuan.

5.4. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer dikumpulkan dari :

1. Ketua/anggota KPUD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pimpinan Partai, ketua pemberdayaan perempuan atau pengurus partai lainnya.
3. Perempuan yang menjadi pengurus partai dan anggota legislatif perempuan hasil Pemilu 2004.

Sementara data sekunder dikumpulkan dari :

1. Dokumentasi data Pemilu 2004 dari KPUD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Dokumentasi hasil-hasil penelitian terkait dengan perempuan dalam politik.
3. Berita-berita yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2009, baik melalui media elektronik maupun media cetak.

5.5. Tehnik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Mengumpulkan laporan/dokumentasi tentang hasil dan analisis Pemilu 2004 dari KPUD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Melakukan *participant observation* dan *non participant observation* dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan persiapan menjelang Pemilu 2009.
3. Melakukan wawancara/*interview* secara mendalam kepada pemimpin partai, pengurus partai, caleg dan anggota legislatif perempuan.

5.6. Analisa Data Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan di atas, informan yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah caleg perempuan. Dari informan utama ini diharapkan terjaring informasi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan dalam partai politik dan proses rekrutmen caleg. Selain caleg perempuan peneliti juga mewawancarai anggota legislatif perempuan periode 2004-2009. Dari anggota legislatif ini peneliti berharap dapat menggali informasi dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi legislatif perempuan dalam melaksanakan kinerja di parlemen. Sebagai upaya penguatan, peneliti menetapkan unsur-unsur pengurus partai sebagai upaya menggali informasi yang terkait kebijakan dan strategi partai dalam proses pencalegan sampai dengan persiapan kampanye. Menyangkut perkembangan politik secara umum dan pandangan-pandangan tentang perempuan dalam ranah politik, peneliti menggali informasi melalui pimpinan atau anggota KPUD provinsi dan LSM perempuan.

Atas dasar kebutuhan-kebutuhan data, informan yang menjadi sampel penelitian ini dilakukan dengan cara sampel bertujuan (*purposive sampling*). Jumlah informan yang diwawancarai 14 orang yang terdiri dari berbagai unsur sesuai dengan data yang ingin dihimpun. Analisa data umumnya melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan interpretasi data.

II. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan propinsi pemekaran yang sebelumnya dibawah kekuasaan wilayah propinsi Sumatera Selatan. Terbentuk pada tanggal 21 November 2000. Wilayah kekuasaan meliputi pulau Bangka dan pulau Belitung yang sekitarnya dikelilingi oleh pulau-pulau kecil lainnya. Luas wilayah baik darat maupun laut mencapai 81.725,14 km². Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km² dan luas laut kurang lebih 65,301 km². Wilayah daratan terbagi enam (6) kabupaten dan satu (1) kota, yaitu : Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang. Jumlah penduduk propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2007 sebesar 1.106.657 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2007 sebanyak 584.178 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 522.479 jiwa.

Keberagaman etnis di kepulauan ini melahirkan keberagaman budaya yang berpengaruh positif terhadap interaksi sosial yang terjalin dalam masyarakat. Pembauran antar kelompok etnis menyebabkan keharmonisan sosial yang ditunjukkan dengan tidak adanya pembedaan antara masyarakat Melayu setempat kelompok etnis Tionghoa. Perkawinan amalgamasi kedua kelompok etnis ini menjadi potensi positif untuk melahirkan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat di kepulauan ini. Kehidupan beragama mendapat porsi yang sama bagi tiap-tiap pemeluknya. Hal ini tercermin dari sikap penduduk yang saling

menghargai dan mendukung dalam setiap perayaan keagamaan dari masing-masing pemeluk agama.

Kondisi sosial budaya yang kondusif tanpa perbedaan yang mencolok dari tiap-tiap kelompok etnis dapat dianggap sebagai potensi yang dapat meningkatkan peran politik masyarakatnya tanpa harus terhalang oleh dominasi nilai budaya. Representasi politik dari kelompok etnis Tionghoa pada Pemilu 2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan Pemilu 2004. Terlalu dini untuk mengatakan bahwa realitas ini sebuah momentum kebangkitan, tetapi paling tidak munculnya politisi dari kalangan etnis Tionghoa ini menunjukkan sebuah kemajuan kesadaran politik bagi setiap warganegaranya.

2. Gambaran Umum Partai Golkar

Eksistensi Golkar mengalami perubahan pada masa transisi demokrasi era reformasi. Golkar dengan paradigma barunya melakukan perubahan pada struktur organisasi, pengambilan keputusan secara demokratis dan transparan dengan melibatkan semua pihak, dan menghilangkan Dewan Pembina dari struktur organisasi Golkar. Institusi Dewan Pembina dianggap menjadi penyebab ketidakmandirian partai Golkar. Mengingat kekuatan Golkar sekarang bertumpu pada rakyat, maka Golkar berusaha menjadi responsif terhadap aspirasi rakyat. Begitu konsep idealnya, tapi persoalannya apakah Golkar sebagai partai politik mampu mengimplementasi apa yang dicita-citakan sudah dapat berjalan sesuai dengan hakekatnya atau alih-alih berubah justru tidak berbeda dengan partai-partai politik lainnya.

Dari data lapangan yang dikumpulkan, dikatakan bahwa dalam kepemimpinan partai Golkar sekarang ini banyak program partai yang stagnan dan tidak mapan serta kepengurusan partai yang lemah dan tidak berkualitas. Kondisi ini diperburuk karena kader partai kehilangan ideologi dimana partai hanya digunakan untuk mencapai kepentingan pribadi. Terpecahnya kekuatan Golkar akibat perbedaan visi diantara pengurus teras yang ditandai dengan lahirnya partai-partai baru yang dipimpin mantan pengurus Golkar dan pergantian kepemimpinan di tingkat pusat memberikan nuansa yang baru dalam kepengurusan di tingkat daerah.

3. Gambaran tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Berbeda dengan partai Golkar yang berusaha merubah citra partai pasca Orde Baru dengan paradigma baru, PDI perjuangan tetap konsisten dengan pencitraan kerakyatan sebagai jargon perjuangan politiknya. PDI Perjuangan merupakan kekuatan partai politik yang dalam retorikanya lebih mengedepankan figur kepemimpinan kharismatik ini dikonstruksi untuk menampilkan citra sebagai pembela *wong cilik*. Bagaimanapun adanya gerakan populis yang direpresentasikan PDI Perjuangan lewat Megawati Soekarno Putri, kekuatan perjuangannya tidak terletak pada platform atau program partai, juga tidak pada struktur organisasi yang ketat. Tumpuan utamanya adalah bagaimana membangun pencitraan partai sehingga mampu memberikan daya tarik bagi kelompok masyarakat yang diwakilinya.

Watak loyalitas yang dibangun PDI Perjuangan untuk mengikat massanya dengan simbol keterwakilan *wong cilik* dilakukan para pemimpin partai ini baik pada level kultural, politik maupun psikologis. Penggunaan simbol Megawati sebagai "anak Soekarno" untuk waktu tertentu mampu menjadi daya tarik. Meskipun kalau kita cermati kehadiran Soekarno lebih mempresentasikan populisme yang progresif (kiri) dibandingkan dengan populisme yang diusung oleh PDI Perjuangan dengan Megawati-nya yang kemudian terbukti lebih watak konservatifnya.

III. Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

1. Proses Rekrutmen Caleg

Sebagai *political selection*, partai politik memiliki fungsi menyeleksi kader partai dengan proses pendidikan politik sehingga kader mempunyai kemampuan atau kompetensi politik yang memadai. Mencermati proses rekrutmen caleg pada partai Golkar dan PDI Perjuangan tidak berbeda secara signifikan. Secara umum kader partai baik yang menjadi pengurus partai ataupun anggota partai menjadi prioritas utama untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif.

Kebijakan internal dan eksternal dalam proses rekrutmen caleg baik bagi partai Golkar maupun PDI Perjuangan sama-sama memperhatikan loyalitas dan prestasi kader khususnya bagi pengurus partai. Kriteria-kriteria seperti ; masa kepengurusan, pendidikan dan posisi dalam struktur kepengurusan menjadi pertimbangan dalam proses rekrutmen caleg. Kebijakan internal partai Golkar terkait penetapan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak. Sementara PDI Perjuangan berdasarkan nomor urut. Namun bagi caleg yang dapat memperoleh 15% suara dari BPP akan dipertimbangkan dalam proses penetapan calon legislatif.

Sementara itu, baik partai Golkar maupun PDI Perjuangan juga memberlakukan kebijakan eksternal untuk merekrut caleg dari kalangan non pengurus partai. Hasil keputusan Rapimnas Partai Golkar menetapkan kebijakan 10% bagi putera daerah yang berprestasi bisa mencalonkan diri sebagai caleg Golkar. Sementara itu PDI Perjuangan memberikan kesempatan pada masyarakat menjadi caleg dengan persyaratan mampu merekrut anggota yang harus dibuktikan dengan KTA sebagai bukti dukungan.

2. Pola Perkaderan Partai

Dalam sistem pengorganisasian partai politik moderen seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan peningkatan *human resources* para kadernya. Perkaderan merupakan sebuah upaya pendidikan politik agar para kader partai memiliki kemampuan politik bernegara sehingga mampu menjalankan fungsinya di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Secara konseptual, pola perkaderan partai Golkar terbagi dalam tiga tingkatan: karakterdes; perkaderan yang ditujukan bagi kader partai di tingkat desa, perkaderan; perkaderan yang ditujukan bagi pengurus partai, dan perkaderan

fungsional; perkaderan bagi para fungsionaris partai atau simpatisan yang bekerjasama dengan lembaga tertentu. Dalam tataran praksis, pola perkaderan partai Golkar tidak berjalan secara baik. Dari hasil investigasi data dilapangan, dijelaskan bahwa perkaderan mengalami kemandekan. Ditengarai penyebabnya karena kurangnya kemampuan pengurus pada bidang perkaderan dan rendahnya orientasi politik para kader. Dengan kata lain banyak pengurus partai cenderung mengedapankan pragmatisme ketimbang ideologi.

Hal yang serupa juga dihadapi oleh PDI Perjuangan. Bisa dikatakan bahwa pola perkaderan ditingkat wilayah maupun kabupaten tidak berjalan dengan baik. Ketika agenda perkaderan dilakukan oleh kepengurusan tingkat pusat, kader daerah yang dikirim tidak bisa mengimplementasi kegiatan tersebut di tingkat daerah. Kenyataannya ini akhirnya menimbulkan kemadegan komunikasi politik internal partai. Dengan kata lain informasi politik yang harusnya dialirkan pada setiap tingkatan kepengurusan, menjadi tersumbat dan hanya mengalir di lingkaran elite partai.

3. Organisasi Pendukung, Organisasi Sayap dan Mesin Politik

Keberadaan organisasi pendukung dan organisasi sayap bagi sebuah partai politik menjadi sebuah elemen kekuatan partai yang dapat dimanfaatkan sebagai mesin politik partai. Partai Golkar dan PDI Perjuangan sebagai partai politik yang memiliki pengalaman politik yang matang di Republik ini, memiliki organisasi pendukung yang mapan. Bagi partai Golkar, organisasi semacam ini dinamakan sebagai organisasi yang mendirikan dan organisasi yang didirikan. Sementara PDI Perjuangan lebih banyak memberikan binaan-binaan bagi kelompok atau komunitas yang merepresentasikan kepentingan *wong cilik*.

4. Dana Kampanye

Dana kampanye merupakan salah satu komponen yang selalu menjadi perhatian dalam setiap kegiatan kampanye. Dana ini dibutuhkan untuk menyiapkan logistik yang akan dimanfaatkan pada masa kampanye. Dalam setiap pelaksanaan Pemilu, caleg diwajibkan untuk menyeter dana kampanye pada partai yang jumlahnya ditentukan sesuai kesepakatan internal partai dengan para caleg. Pada Pemilu 2004, nominal dana kampanye ditentukan oleh posisi nomor urut caleg. Kondisi ini disesuaikan dengan sistem Pemilu pada saat itu dimana penetapan calon legislatif berdasarkan nomor urut.

Menurut pengakuan para caleg baik dari partai Golkar maupun PDI Perjuangan, kewajiban akan dana kampanye pada Pemilu 2009 disesuaikan dengan kebutuhan kampanye para caleg dalam satu daerah pemilihan (dapil). Kesepakatan ini atas pertimbangan sistem Pemilu dengan kebijakan suara terbanyak. Mengingat para caleg lebih banyak bergerak secara personal maka beberapa diantara mereka ada yang merasa keberatan jika harus dibebani menyeter dana kampanye kepada partai.

5. Kekuatan, Kelemahan, Hambatan dan Peluang

Mencermati eksistensi perempuan dalam kontestasi politik Pemilu 2009 dapat

dilihat dengan analisis SWOT. Analisa ini dapat digunakan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, hambatan dan peluang caleg perempuan sebagai kesimpulan data yang dihimpun dari lapangan.

Kekuatan (*strenght*) sebagai pendukung perempuan dalam ranah politik adalah UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, khususnya pasal 2, 20, dan 31 serta UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, khususnya pasal 55, 57, 58, dan 61. Aspek-aspek alami (*nurturing aspects*) yang dimiliki perempuan dapat dijadikan kekuatan mengingat perempuan cenderung menggunakan pendekatan yang lebih humanis dalam menyelesaikan permasalahan. Dari sudut pandang agama Islam, konsep tentang Al-Istiqlal al Syiyasah dan Al-Istiqlal al Syaksi memberikan jaminan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik.

Di lihat dari kelemahan (*weaknes*), kesadaran perempuan untuk berpartisipasi dalam politik masih rendah. Disamping itu sumber daya manusia (*human capital*) terkait tingkat pendidikan formal, pengalaman politik, dan modal sosial (*social capital*) juga masih kurang memadai untuk melengkapi kontestasi politiknya. Hambatan (*oppurtunity*) berupa peran ganda, *nurturing aspects* dan kemampuan *public speaking*, memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Beberapa peluang (*treaty*) yang dapat dimanfaatkan perempuan untuk ambil bagian dalam Pemilu 2009 adalah legalitas mekanisme quota 30 persen dan dukungan moral dari gerakan aktifis perempuan melalui NGO/LSM, merupakan dorongan sekaligus kekuatan psikologis yang harus dimanfaatkan oleh perempuan untuk berkontestasi pada Pemilu 2009.

IV. Strategi Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

1. Perbandingan Strategi Kampanye Partai Golkar dan PDI Perjuangan

Strategi kampanye merupakan tindakan-tindakan strategis yang tepat untuk mendapatkan dukungan massa sehingga tercapai target kekuasaan yang diharapkan. Mencermati strategi kampanye dari partai Golkar dan PDI Perjuangan, terlihat adanya kesamaan dari cara-cara pendekatan kepada konstituen. Kesamaan ini bisa saja dilatarbelakangi oleh ideologi yang sama dari kedua partai politik tersebut. Mengusung ideologi nasionalis menjadikan kedua partai ini memiliki basis massa yang plural.

Hasil inventarisasi strategi kampanye seperti pendekatan secara *door to door*, kegiatan-kegiatan sosial bagi masyarakat kurang mampu atau "*wong cilik*", dan rapat terbuka menjadi pilihan yang dilakukan baik oleh partai Golkar maupun PDI Perjuangan. Walaupun secara teknis partai-partai tersebut memiliki cara yang berbeda namun secara substantif strategi yang mereka mainkan serupa adanya. Perbedaan diantara partai-partai tersebut terletak pada kebijakan-kebijakan internal partai. Sebagai partai moderen Golkar didukung oleh struktur organisasi yang mapan dan platform yang tersistematis. PDI Perjuangan sebagai partai yang populis lebih mengedepankan kharismatik atau ketokohan sebagai kekuatan partai. Struktur organisasi dan platform partai ditampilkan secara cukup sederhana.

2. Strategi Kampanye Caleg Perempuan.

Dengan kebijakan suara terbanyak yang ditetapkan oleh partai sebagai mekanisme penetapan calon anggota legislatif, menyebabkan caleg perempuan Partai Golkar harus bekerja keras dan menyusun strategi yang tepat agar mampu menarik simpati dukungan massa. Strategi *door to door* menjadi cara yang cukup populer dikalangan caleg perempuan untuk berinteraksi dengan konstituennya. Selain menyebarkan kartu nama atau stiker, untuk caleg yang mampu secara finansial adakalanya juga memberikan bantuan atau bingkisan kepada konstituen.

Caleg perempuan PDI Perjuangan, secara umum juga menggunakan strategi *door to door* sebagai cara untuk mendekati para konstituennya. Walaupun kebijakan partai ini menggunakan mekanisme nomor urut dalam penetapan calon anggota legislatif namun partai akan memperhatikan caleg yang mampu meraih perolehan 15% suara BPP untuk dipertimbangkan dalam penetapan anggota legislatif. Kebijakan ini memberikan motivasi yang cukup signifikan bagi para caleg untuk bekerja keras mendapatkan simpati konstituennya.

Kebijakan-kebijakan internal dari partai Golkar maupun PDI perjuangan, mengandung nilai kompetisi terbuka antar caleg. Untuk menyikapi kondisi ini para caleg menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan. Kondisi objektif yang ditemukan dilapangan, tidak sedikit para caleg melakukan praktik-praktik *illegal logic* sebagai upaya mereka mendapatkan simpati dan dukungan suara dari konstituen. Praktik-praktik *illegal logic* merupakan fenomena yang lazim ditemukan dalam setiap agenda pemilihan. Cara yang paling mudah untuk mendeteksi praktik semacam ini dalam ranah politik cukup dengan membandingkan antara *das seins* dan *das sollen* maka praktik *illegal logic* dapat diukur.

Praktik *illegal logic* yang umumnya dilakukan beberapa caleg dengan cara membangun komitmen antar caleg dari partai yang berbeda dalam satu daerah pemilihan (dapil). Perbedaan tingkatan pencalonan anggota legislatif menjadi arena yang lazim dimanfaatkan untuk saling memberikan dukungan dengan kesepakatan yang tidak tertulis tentunya. Dengan pertimbangan kekerabatan atau pertemanan caleg dari partai A untuk pencalonan tingkat kabupaten/kota memberikan dukungan untuk caleg dari partai B untuk tingkat pencalonan propinsi atau pusat. Dikatakan *illegal logic* mengingat idealnya para caleg dari satu partai yang sama harusnya bersinergi untuk meningkatkan dukungan suara partai bukan membangun komitmen dengan caleg partai lain demi kepentingan personal. Ditengarai keputusan MK dengan sistem suara terbanyak menjadi pemicu maraknya praktik-praktik *illegal logic* pada Pemilu 2009.

3. Prospek Keterwakilan Perempuan Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi

Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan penetapan calon anggota legislatif dengan mekanisme suara terbanyak, menggugurkan pasal 214 UU No. 10/2008 tentang Pemilu, sekaligus juga menggugurkan kebijakan internal partai politik. Klausul tentang kuota 30 persen yang tertuang dalam pasal-pasal UU Pemilu idealnya menjadi proyek pencerahan bagi representasi perempuan dalam

parlemen. Atas dasar kebijakan itu, beberapa partai politik mempersiapkan caleg perempuannya untuk ditempatkan pada nomor urut jadi. Namun sayangnya kebijakan ini menjadi terbalik karena keputusan MK melahirkan *free fight competition* dan disinyalir keputusan ini semakin mempersulit posisi caleg perempuan.

Keputusan MK selintas dianggap demokratis atas pertimbangan bahwa keterwakilan idealnya harus didukung oleh rakyat. Tapi keputusan ini banyak dikritisi oleh berbagai pihak terutama LSM atau organisasi perempuan karena keputusan itu bertolak belakang filosofi kuota yang tepatnya diterapkan dalam sistem pemilihan yang proporsional. Realitas politik ini selanjutnya menimbulkan permasalahan yang cukup serius mengingat tanpa keputusan MK penempatan nomor urut caleg perempuan tidak terlalu menguntungkan. Dalam penyusunan daftar caleg, rekrutmen dan penempatan nomor urut caleg perempuan hanya terbatas pada pemenuhan kuota. Dengan kenyataan ini bagaimana kita bisa mengatakan bahwa *affirmative action* sebagai sebuah pencerahan politik bagi kaum perempuan. Sementara untuk membangun kesadaran politik, perempuan harus mengalahkan ke-liyan-an yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi mereka sebagai makhluk sosial maupun individu. Fakta dilapangan menunjukkan adanya realitas yang masih sulit untuk dinafikan ketika perempuan dihadapkan pada pilihan antara ruang publik dan ruang domestik sebagai arena representasi diri mereka.

Sebagai apresiasi peneliti terhadap permasalahan ini didasari atas pemahaman akan cara berpikir biner (*binery category*) ketika memaknai *opresi* kekuasaan dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas (dalam hal ini perempuan). Untuk menjadi demokratis, elit politik dan kelompok kepentingan *bermimesis* terhadap apa yang telah dilakukan oleh negara-negara yang telah menerapkan kebijakan yang sama tapi kita lupa melihat realitas sosial yang ada di dalam negara kita sendiri. Kita selalu terjebak dalam pusaran pemikiran yang *taken for granted* ketika melakukan sebuah perubahan. Kenyataannya pengadopsian kebijakan kuota tidak didukung secara holistik oleh infrastruktur yaitu sistem politik itu sendiri maupun suprastruktur yang dalam hal ini diwakili oleh kebijakan internal partai politik.

Berpikir biner dengan mengkalkulasi positif dan negatif tentang perempuan di ranah politik, tidak serta merta dapat merubah konstruksi masyarakat tentang perempuan. Karena mitos tentang perempuan tidak bersifat seragam. Pada tataran masyarakat yang mana perempuannya dapat berbicara tentang hak, tentang kesetaraan, dan tentang keadilan. Hal ini perlu dicermati karena kita tidak mungkin mengabaikan ada beragam perempuan dengan beragam tingkatan sosial ekonomi di tanah air kita. Di dalam kelompok perempuan sendiri sebagai warganegara, ada kelas-kelas sosial yang menyertai eksistensi mereka. Hal ini membuktikan bahwa universalitas itu berlaku abstrak. Tidak menutup kemungkinan perempuan yang berpendidikan pada level kelas sosial yang lebih tinggi tanpa disadari mengopresi perempuan pada level kelas sosial di bawahnya demi kepentingan kelas. Mari kita lihat realitasnya, asumsi bahwa *gender and politics* harus berdasarkan asas kesetaraan, merupakan pencarian rasionalitas yang

sebenarnya masih problematik. Letak permasalahannya ada pada infrastruktur dan suprastruktur politik dan kualitas sumber daya perempuan yang masih rendah. Hal ini harus diakui walaupun terkesan tidak berpihak, namun harus menjadi perhatian mengingat pelaku perubahan tentunya tidak ingin ketika akses dibuka tetapi ketika masuk dan berada di dalam sistem, perempuan menjadi gamang walaupun kualitas laki-laki belum tentu lebih baik. Maka dari itu, filosofi *enlightment* tentang totalitas seharusnya menjadi fokus terpenting bagi perempuan sendiri maupun pihak-pihak pendorong perubahan sehingga perjuangan *affirmative action* bukan semata kebijakan politis tetapi sebagai kebijakan pencerahan politik perempuan. Dengan kata lain dibutuhkan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan partai agar keterwakilan perempuan diimplementasikan secara benar sebagai upaya pencerahan politik bagi perempuan bukan sekedar tataran simbolik yang dituangkan dalam aturan konstitusi.

Daftar Referensi

- Abdullah, Irwan (ed), 2006, *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2007, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Peelajar.
- Agger, Ben, 2007, *Teori Sosial Kritis; Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Akhyar Yusuf Lubis, 2006, *Dekonstruksi Epistemologi Modern*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Djohar, Zubaidah, 2006, *Jika peduli menjadi solusi: peran organisasi perempuan Aceh dalam proses penyelesaian konflik* dalam Sulistyowati Irianto (ed) *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- De Beauvoir, Simone, *Second Sex; Fakta dan Mitos*, Pustaka Prometheus, Surabaya, 2003.
- Fakih, DR. Mansour, 2007, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004, *Teori Sosial Modern*, (Terj. Tribowo Santoso), Jakarta: Interpratama Offset.
- Haryatmoko, DR, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.
- Hardiman, F. Budiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Ibrahim, Nirwana Sari, dkk, 2007, *Koba dalam Historiografi*, Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM.
- Jurnal Perempuan Nomor: 50 tahun 2007
- Kusumaningtyas, A.D, 2006, *Perempuan dalam partai-partai politik Islam peserta Pemilu 2004: representasi dan pandangan politik*, dalam Sulistyowati Irianto (ed) *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lawang, Robert MZ, 2005, *Kapital Sosial; dalam Perspektif Sosiologik*, Jakarta: Fisip UI Press.
- Liz Stanley, 1992, "Feminist Praxis, Research, Theory and Epistemology in Feminist Sociology", *Social Forces*, Vol. 71, No. 1.

- Lovenduski, Joni, 2008, *Politik Berparas Perempuan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mas'ood, Mohtar & Mac. Andrews, Colin, 2001, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mosse, Julia Cleves, 2007, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Majalah Biografi Politik, Volume 1, Februari 2008.
- Putnam Tong, Rosemarie, 2006, *Feminist Thought*, edisi Indonesia, Yogyakarta: Jalasutra.
- Sastriyani, Siti Hariti (ed), 2009, *Gender and Politic*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Satriyani, Siti Hariti (ed), 2009, *Women in Public Sector*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Soeprapto dan Sumarah, Sri Rahayu, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Soetjipto, Ani Widyani, 2005, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tandjung, Akbar, 2007, *The Golkar Way; Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Citra Umbara, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2009, Kasindo Utama, Surabaya.
- United Nation Development Programme (UNDP), *Partisipasi Politik Perempuan Dalam Tata Pemerintahan Yang Baik: Tantangan Abad 21*, Copy right 2003.
- Harian Kompas, senin 3 Maret 2008: *(Tak) Berharap pada UU Pemilu dan UU Pemilu; Dari Partai untuk Partai?*
- Harian Bangka Pos, lembaran-lembaran yang memuat perkembangan persiapan Pemilu 2009, sejak bulan Agustus sampai dengan Desember 2008.
- Makalah Seminar; Optimalisasi Peran Aktif Perempuan dalam Peta Politik Menyongsong Pemilu 2009, Prof. DR. H. Deddy Ismatullah, SH, M.Hum, di Pangkalpinang.
- Berita dan informasi tentang perkembangan politik menjelang Pemilu di Metro TV

dalam "Election Up Date" sejak Desember 2008 sampai dengan Maret 2009.

Tentang Penulis:

Dra. Aimie Sulaiman, M.A, lahir dari keluarga keturunan Tionghoa yang mengutamakan pendidikan sehingga dia menjadi individu yang memiliki komitmen tinggi bagi proses pendidikan anak bangsa. Selalu menggunakan motto *Learning Hasn't Taken Place Until Has Change Behaviour* ini menyelesaikan pendidikan SD, SMP dan SMA nya di kota Sungailiat. Menyelesaikan pendidikan strata satu nya di Universitas Andalas, Padang jurusan sosiologi pada tahun 1990. Pada tahun 2007 melanjutkan Pascasarjana Sosiologi pada Universitas Gajah Mada dan selesai pada tahun 2009. Aktivitasnya dalam dunia pendidikan dihabiskan di beberapa SMA di kota Sungailiat dan Lampung. Pengalaman kerja di bidang lainnya adalah dunia *broadcasting* sebagai staf marketing dan pemandu acara talk show di stasiun radio Female di Lampung.